

Politik Dinasti Di Indonesia : Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi

Asitha Dewi Mustika Syanur, Ida Bagus Shantih A. W., dan Lucy Afrilia
Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Jl Prof.
Dr. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia.
E-mail: asithadewims@gmail.com, gusantih@gmail.com lucyafri lia@gmail.com

Abstract

The aim of the research is to reveal dynastic politics and the implementation of democracy in the era of President Jokowi's leadership. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, explicitly recognizes that the form of the Unitary State of the Republic of Indonesia adopts a democratic system. In reality, dynastic politics or political dynasties have developed and are considered a violation of democratic ethics in Indonesia. All efforts and strategies made by the ruling parties to assign positions based on "family ties" can hinder and complicate public participation in political contestation in democratic countries. The development of dynastic political issues in the era of President Jokowi's leadership began with the advancement of President Jokowi's son-in-law and eldest son to become Mayor. Then there was a decision by the Constitutional Court which was deemed to have violated the code of ethics regarding changes to the minimum requirements for presidential and vice presidential candidates for the Republic of Indonesia which succeeded in bringing Gibran Rakabuming as a candidate for vice president of the Republic of Indonesia. This alleged dynastic politics has raised concerns regarding its impact on the political process, public representation, and the democratic system in Indonesia. It is important to reform the political recruitment process so that it is more transparent, has integrity, and is based on individual qualifications and capabilities. This will not only strengthen political parties as democratic institutions but will also maintain the sustainability and stability of democracy in Indonesia.

Keywords: *Dynasty Politics; Democracy; Ethics*

Abstrak

Tujuan penelitian, ini mengungkapkan politik dinasti dan penerapan demokrasi di era Kepemimpinan Presiden Jokowi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas mengakui bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia mengadopsi sistem demokrasi. Pada kenyataannya, politik dinasti atau dinasti politik telah berkembang dan dinilai sebagai pelanggaran etika berdemokrasi di Indonesia. Segala upaya dan strategi yang dilakukan oleh pihak berkuasa untuk memberikan jabatan berdasarkan "ikatan keluarga" dapat menghambat dan mempersulit partisipasi masyarakat dalam kontestasi politik di negara demokrasi. Perkembangan isu politik dinasti di era kepemimpinan Presiden Jokowi diawali dengan maju nya menantu dan putra sulung Presiden Jokowi menjadi Wali Kota. Kemudian adanya putusan MK yang dinilai melanggar kode etik terkait perubahan syarat batas minimal capres dan cawapres NKRI yang berhasil membawa Gibran Rakabuming sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia. Dugaan politik dinasti ini telah menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap proses politik, representasi publik, dan sistem demokrasi di Indonesia. Penting untuk mereformasi proses rekrutmen politik agar lebih transparan, berintegritas, dan berdasarkan pada kualifikasi serta kapabilitas individu. Hal ini tidak hanya akan memperkuat partai politik sebagai lembaga demokratis, tetapi juga akan menjaga keberlanjutan dan kestabilan demokrasi di Indonesia

Kata Kunci: Politik Dinasti; Demokrasi; Etika

Pendahuluan

Dalam negara demokrasi politik memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Melalui sosok pemimpin terbaik yang dipilih dan diberikan mandat oleh rakyat untuk mengatur segala urusan pemerintahan dengan harapan nantinya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kedepannya. Oleh karena itu, dinamika politik dalam negara demokrasi harus bersifat positif dan konstruktif sehingga dapat berdampak baik terhadap kemajuan bangsa kedepannya. Namun, sangat disayangkan dalam penerapannya seringkali kita temui berbagai macam praktik politik yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi seperti isu yang sedang berkembang ditengah masyarakat, yaitu upaya atau manuver pemerintah petahana dalam mensukseskan calon yang memiliki ikatan keluarga menjadi pemimpin suatu wilayah. Sehingga pada akhirnya hal ini memberikan penyakit yang mencederai sekaligus menghambat perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Segala bentuk praktik atau strategi orang dalam mempertahankan kekuasaan agar selalu berada di pihaknya dengan cara memenangkan calon yang masih terkait hubungan keluarga dapat diartikan sebagai politik dinasti. Adanya indikasi praktik politik dinasti oleh Presiden Jokowi dengan majunya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution kedalam kontestasi pilkada menimbulkan berbagai polemik ditengah masyarakat. Belum lagi dengan dikeluarkannya putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres. yang pada akhirnya berhasil mengantarkan Gibran Rakabuming yang bahkan belum genap menjabat selama satu periode sebagai walikota, kemudian menjadi Cawapres dalam pemilu 2024 mendampingi Prabowo Subianto. Hal ini semakin menguatkan indikasi adanya praktik politik dinasti dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

Kehadiran politik dinasti dalam negara demokrasi dapat menjadi mimpi buruk bagi bagi keberlangsungan prinsip demokrasi kedepannya. Adanya kekuasaan yang dipegang oleh segelintir orang dengan dasar ikatan keluarga dapat menciptakan celah yang besar terhadap KKN suatu pemerintahan. Negara demokrasi semestinya dapat membuka ruang partisipasi politik luas dan adil bagi seluruh masyarakat. Adanya politik dinasti dapat menciptakan ketidaksetaraan status sosial dalam kontestasi politik sehingga pada akhirnya menimbulkan kecacatan dalam etika dan representasi demokratis dalam berpolitik. Dalam mencegah hal ini, peran partai politik dalam memfilter/menyeleksi calon pemimpin yang diusung berdasarkan kemampuan dan kualitasnya sebagai pemimpin menjadi sangat krusial guna mencegah maraknya praktik politik dinasti di Indonesia. Kajian terhadap proses rekrutmen politik menjadi sangat penting karena jika rekrutmen tidak dilaksanakan dengan baik, dampaknya akan merugikan partai politik itu sendiri, bahkan dapat melahirkan praktik dinasti politik. Kecenderungan membentuk dinasti politik tidak hanya merugikan partai politik, tetapi juga memiliki dampak yang tidak baik terhadap demokrasi. Sehingga, diperlukan adanya *check and balances* yang seharusnya menjadi pilar penting dalam sistem pemerintahan demokratis untuk memastikan kapabilitas seseorang yang maju dalam kontestasi politik mewakili partai.

Studi ini secara khusus menyoroti bagaimana proses manuver politik dari pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sebagai orang yang memiliki ikatan keluarga dengan Presiden Jokowi dalam kontestasi politik di Indonesia. Awalnya, pimpinan cabang Partai PDI-P sudah menentukan calon yang akan diusung dalam kontestasi tersebut. Namun, perubahan dinamika muncul ketika Gibran, yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo, turut mengajukan diri melalui partai yang sama. Langkah ini diakui dengan meminta restu langsung kepada pimpinan pusat Partai PDI-P. Akhirnya, Gibran terpilih dan diusung sebagai calon walikota Solo oleh PDI-P. Penting untuk mengkaji fenomena ini mengingat hubungan keluarga Gibran dengan Presiden Jokowi, yang juga merupakan tokoh

yang diusung oleh PDI-P. Hal ini menunjukkan adanya saling keterkaitan antara kepentingan keluarga dan keputusan politik partai, yang dapat merintangai integritas dan keadilan dalam proses politik. Praktik-praktik semacam ini menciptakan dilema etis dalam dinamika politik, di mana keputusan rekrutmen politik tidak sepenuhnya didasarkan pada kualifikasi dan kapabilitas seseorang, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor hubungan personal dan keluarga. Seharusnya, partai politik berperan sebagai penjaga integritas dan kualitas calon yang diusung, bukan sebagai alat untuk memfasilitasi terbentuknya dinasti politik. Praktik dinasti politik membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi secara keseluruhan. Kelemahan dalam proses rekrutmen politik membuka pintu lebar-lebar untuk kemungkinan terbentuknya kekuasaan yang terpusat pada kelompok tertentu. Hal ini akan melemahkan kontrol dan keseimbangan pemerintahan, yang merupakan esensi dari sistem demokratis.

Oleh karena itu, penting untuk mereformasi proses rekrutmen politik agar lebih transparan, berintegritas, dan berdasarkan pada kualifikasi serta kapabilitas individu. Hal ini tidak hanya akan memperkuat partai politik sebagai lembaga demokratis, tetapi juga akan menjaga keberlanjutan dan kestabilan demokrasi di Indonesia. Pentingnya memperkuat regulasi, penerapan prinsip-prinsip demokrasi internal, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan calon dapat menjadi langkah-langkah untuk mengatasi problematika dalam rekrutmen politik dan menghindari praktik dinasti yang merugikan demokrasi.

Metode Penelitian

Metode

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berfokus pada politik dinasti pada Era Presiden Jokowi. Data penelitian didapatkan dari hasil *literature review* dengan menelusuri berbagai jurnal, artikel, dan berita media massa yang telah dilakukan validasi untuk memastikan keabsahan data tersebut. Literature yang peneliti jadikan objek penelitian tidak hanya sebatas buku terkait politik dinasti, tetapi melakukan kajian dan riset secara mendalam terhadap gagasan yang penulis usungkan.

Tinjauan Pustaka

Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Secara harfiah, demokrasi menunjukkan bahwa pemerintahan dilakukan oleh rakyat, dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan mereka dan dijalankan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih melalui sistem pemilihan umum yang bebas. Menurut Schattschneider demokrasi merupakan kegiatan politik yang kompetitif dan terdapat persaingan di antara organisasi dan para pemimpin dalam membuat implementasi kebijakan publik sehingga mengharuskan publik berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana demokrasi adalah pemerintah oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat agar menyatukan pemerintahan dengan rakyat. Demokrasi sebagai pandangan ataupun gagasan hidup dengan mengutamakan persamaan hak dan kebebasan bagi seluruh warga negara yang mempengaruhi kehidupannya.

Berdasarkan studi literasi digital yang peneliti lakukan pada laman Kemendagri mengenai prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila ada 4 yang meliputi :

1. Prinsip kerakyatan bahwa posisi tertinggi negara berada ditangan rakyat (kedaulatan rakyat) yang bersifat tunggal dan tidak bisa terbagi.
2. Prinsip hikmah kebijaksanaan bahwa hikmah diartikan sebagai kehendak tuhan yang maha esa, sedangkan kebijaksanaan yaitu berpikir secara rasionalisme untuk mencari kebenaran.

3. Prinsip permusyawaratan bahwa pentingnya bertukar pikiran dan penyampaian aspirasi untuk mencapai mufakat, tentunya menuntun rakyat dalam menentukan pilihan yang tepat dari banyaknya perspektif beragam.
4. Prinsip perwakilan bahwa prinsip demokrasi harus selaras dengan Pancasila yang diamanatkan kepada para wakil rakyat.

Politik dinasti

Politik dinasti adalah kekuasaan politik dimana sekelompok orang tertentu yang memiliki hubungan kekerabatan atau erat kaitannya dengan keluarga. Politik dinasti senantiasa melakukan regenerasi kekuasaan untuk mencapai kepentingan suatu golongan agar dapat mempertahankan kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dinasti adalah keturunan raja - raja yang memimpin dan semuanya berasal dari satu keluarga, namun karena sistem pemerintahan di Indonesia bukan monarki maka muncullah istilah politik dinasti. Pandangan masyarakat terhadap politik dinasti cenderung membuat masyarakat khawatir dan berpengaruh pada kestabilan negara karena menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik di Indonesia. Sedangkan pandangan para politisi bahwa ini menjadi tantangan serius karena akan berpengaruh penilaian terhadap rendahnya kualitas sistem pemerintahan. Politik dinasti yang marak terjadi akan senantiasa mempertahankan kekuasaan dengan cara tidak etis dan membuka peluang untuk diturunkan secara turun menurun dan berorientasi terhadap kepentingan diri sendiri dan tidak berintegritas. Sebagaimana politik dinasti yang diturunkan langsung kepada keluarga besar agar memperoleh posisi kekuasaan berdasarkan pengalaman keluarga agar posisi/jabatan dapat diwariskan secara turun menurun.

Adanya politik dinasti membuat orang yang tidak memiliki kompetensi dapat memperoleh kekuasaan, sedangkan orang yang memiliki kompetensi harus lebih *challenging* agar mendapatkan peluang besar dalam meraih kekuasaan. Meskipun di Indonesia proses pemilihan pemimpin dilakukan secara demokrasi dari rakyat, tetapi kekuatan politik oleh kaum elit serta dukungan pihak loyalitas pengikut juga memberikan kemungkinan terjadinya peralihan kekuasaan secara turun menurun. Sehingga politik dinasti dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi karena dapat memonopoli kekuasaan dan melibatkan sekelompok orang tertentu yang terkait hubungan keluarga akan merusak prinsip persamaan dan hak demokrasi. Sebagaimana hal ini memicu pluralisme yang berfokus pada pemeliharaan kekuasaan dan bertentangan pada prinsip demokrasi.

Etika

Etika adalah norma dan aturan yang berlaku sebagai pedoman hidup manusia dalam berperilaku yang berkaitan dengan moral. Aristoteles mendefinisikan etika menjadi dua bagian yakni *terminus* dan *techicus* sebagaimana etika yang mengajari tentang masalah dari perbuatan dan tindakan manusia, sedangkan *manner* dan *custom* yakni kebiasaan atau adat yang melekat pada diri seseorang yang berhubungan dengan baik dan buruk terhadap perbuatan dan tingkah laku manusia. Dengan adanya etika dapat menilai perbuatan seseorang pantas atau tidak pantas, dikarenakan aturan ini menjadi landasan menjalankan kehidupan baik dalam bermasyarakat. Etika tentunya memiliki sudut pandang normatif dimana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Dalam konteks politik, etika menjadi suatu hal penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, pencapaian dalam perilaku politik. Sebagaimana posisi etika ini jauh lebih tinggi dibanding hukum, sehingga apabila adanya pelanggaran etika akan mengarah pada pelanggaran hukum. Dalam konteks politik yang terjadi di Indonesia dimana etika memainkan peran krusial sebagai landasan berjalannya kehidupan yang baik dalam bermasyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya, kita semua mengetahui bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dan kehidupan bersama yang mengutamakan gagasan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas mengakui bahwa bentuk negara kesatuan ini mengadopsi sistem demokrasi. Konstitusi Republik Indonesia juga menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik dalam pemilihan maupun sebagai calon pemimpin. Ketika negara dianggap sebagai milik bersama, penting untuk menghindari satu kelompok yang mengendalikan kehidupan politik melalui konstitusi. Setiap warga negara berhak menduduki jabatan publik selama mereka mendapatkan kepercayaan publik. Konsep demokrasi pada masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintahan. Namun, sekarang ini, demokrasi dipahami lebih luas lagi sebagai sistem pemerintahan atau politik.

Pada kenyataannya, politik dinasti berkembang pada sistem demokrasi di Indonesia. Kehadiran politik dinasti ini menimbulkan keprihatinan terkait ketidaksetaraan dalam pembagian kekuasaan politik, yang dapat menciptakan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik. Hal ini dikenal sebagai konsep “kekuasaan melahirkan kekuatan.” Kehadiran dinasti politik dalam suatu negara dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi dan merusak prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, dan keadilan dalam politik. Hal ini dapat terjadi karena kekuatan politik dan ekonomi dari keluarga-keluarga politik yang berlangsung terus-menerus selama beberapa generasi. Hal tersebut dapat memperkuat dominasi atau monopoli kekuasaan kelompok elit politik tertentu dan membatasi partisipasi politik warga negara lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga politik. Tumbuh berkembangnya dinasti politik umumnya menjadi pro-kontra. Pola politik ini dianggap memiliki kapasitas untuk menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Dualisme ini mengarah pada konsensus yang berkembang bahwa melarang anggota keluarga penguasa atau petahana berpartisipasi dalam politik merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia mereka.

Dugaan Politik Dinasti di Era Presiden Jokowi

Politik dinasti telah menjadi penyakit dalam kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia. Segala upaya dan strategi yang dilakukan oleh pihak berkuasa untuk memberikan jabatan berdasarkan "ikatan keluarga" dapat menghambat dan mempersulit partisipasi masyarakat dalam kontestasi politik di negara demokrasi. Hal ini disebabkan oleh adanya campur tangan keluarga untuk mendukung calon tersebut, sehingga menciptakan perbedaan status sosial dan kekuatan politik dengan calon lainnya. Indikasi campur tangan pemerintah yang berkuasa dalam suatu kontestasi politik terhadap calon yang memiliki ikatan keluarga menciptakan stigma buruk di tengah masyarakat dan kemudian mengarah terhadap isu dugaan politik dinasti dalam suatu pemerintahan yang mana dalam konteks kali ini merujuk pada dinasti politik pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo

Istilah dinasti Politik/Politik dinasti dapat diartikan sebagai segala bentuk strategi atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa (petahana) dalam mempertahankan kekuasaan politik agar tetap berada di pihaknya dengan mensukseskan calon yang merupakan anggota keluarga. Menurut artikel MKRI dijelaskan bahwa terdapat empat alasan munculnya politik dinasti adalah sebagai berikut :

1. Adanya keinginan dalam diri maupun keluarga untuk memegang kekuasaan.
2. Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.
3. Adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politik.

4. Adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi.

Kehadiran Presiden Joko Widodo yang bukan berasal dari keluarga petahana dalam kontestasi pemilu 2014 pada awalnya memberikan angin segar terhadap iklim demokrasi di Indonesia. Kehadiran sosok Presiden Jokowi dianggap sebagai pemutus adanya dinasti politik di Indonesia. Namun, lambat laun hal tersebut mulai dipertanyakan seiring dengan adanya berbagai macam manuver dan dinamika politik yang melibatkan keluarga Presiden Jokowi dalam kontestasi politik. Perkembangan isu politik dinasti di era pemerintahan Presiden Jokowi diawali dengan majunya menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution sebagai walikota medan pada tahun 2020 dan putra sulungnya Gibran Rakabuming sebagai Walikota Solo. Pencalonan anggota keluarga Presiden Jokowi saat beliau masih menjabat pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa sebenarnya hal tersebut tidaklah etis dan tidak mencerminkan keadilan (*fairness*) dalam kontestasi politik di Indonesia. Terlebih lagi sosok Gibran rakabuming belum memiliki track record dalam dunia politik sebelumnya. Sehingga pada akhirnya akan menimbulkan tanda tanya terkait apa yang menjadi faktor utama tingginya tingkat elektabilitas seorang Gibran Rakabuming dalam pilkada Solo 2020. Namun, disatu sisi terdapat juga anggapan bahwa siapapun dapat berpartisipasi dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam suatu kontestasi politik selama tidak melanggar aturan yang berlaku.

Ujang Komarudin, seorang pengamat politik dari Universitas Al Hazzar berpendapat bahwa Gibran memiliki peluang hingga 90% untuk menang dalam kontestasi pilkada tersebut. Hal ini disebabkan karena mayoritas partai di solo merupakan pendukung Presiden Jokowi dan partai PDI. Adanya dukungan yang besar oleh mayoritas partai di solo terhadap Presiden Jokowi sangat berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas Gibran dalam pilkada 2020. Selain itu sepak terjang yang baik dari pemerintahan joko widodo selama menjadi walikota solo juga berdampak pada Tingkat elektabilitas Gibran dalam pilkada 2020. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh indo barometer pada tahun 2020 didapati tingkat elektabilitas Gibran pada pilkada 2020 adalah sebesar 65% terpaut sangat jauh dengan lawannya yakni wahyu bagyono yaitu sebesar 4,5%. Gibran Rakabuming kemudian berhasil memenangkan pilkada dengan perolehan suara sebesar 86,5% dari total 260,532 suara sah dan disatu sisi bobby nasution juga berhasil memenangkan pilkada pada tahun 2020 sebagai walikota medan dengan perolehan suara 52,8% dari total 735,907 suara sah.

Kemenangan putra sulung dan menantu Jokowi dalam pilkada 2020 semakin membangkitkan isu politik dinasti di Indonesia. Presiden Jokowi dianggap ingin melanggengkan kekuasaan dengan menyukseskan orang-orang di pihaknya menjadi penguasa melalui berbagai macam manuver politik yang halus. Perkembangan isu politik dinasti pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo kemudian semakin menguat dengan adanya upaya untuk meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dalam hal ini diduga terdapat suatu manuver politik yang dilakukan sehingga pada akhirnya menghasilkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres. Putusan tersebut pada akhirnya berhasil membawa Gibran lolos menjadi cawapres dalam kontestasi pemilu 2024. Adanya dinamika politik yang mewarnai pengusungan Gibran sebagai calon wakil presiden menimbulkan anggapan bahwa terdapat politik by design oleh pemerintah yang berkuasa dengan melibatkan koneksi dan ikatan kekeluargaan dalam kelembagaan negara. Mengingat putusan MK tersebut disahkan oleh Anwar Usman yang sekaligus merupakan ipar Presiden Jokowi dan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Hal ini yang kemudian juga dinilai sebagai suatu bentuk tindakan yang bertentangan dengan kode etik kehakiman dan asas peradilan yang berbunyi "*Nemo Judex In Causa Sua*" yang berarti seorang

hakim tidak boleh mengadili perkara yang berhubungan dengannya. Akar dari permasalahan ini adalah dicopotnya Anwar Usman dari jabatan Ketua MK atas dasar pelanggaran kode etik.

Dengan dikeluarkannya Keputusan MK semakin mengindikasikan adanya strategi untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres pada pemilu tahun 2024. Sosok Gibran yang dianggap masih terlalu muda dan minim pengalaman dalam bidang politik menimbulkan spekulasi bahwa Gibran mengandalkan adanya koneksi dan ikatan keluarga dalam upaya untuk mencapai kemenangan pada pemilu 2024 nanti. Ditambah lagi dengan diangkatnya putra bungsu Jokowi yaitu Kaesang Pangarep sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin menonjolkan adanya manuver politik yang dilandaskan dengan ikatan kekeluargaan. Hal ini kemudian sekali lagi memunculkan berbagai macam spekulasi publik terhadap isu politik dinasti dalam pemerintahan presiden Jokowi. Jika ditinjau dari aturan hukum yang berlaku maka majunya Gibran sebagai cawapres merupakan hal yang sah-sah saja. Namun, terdapat juga anggapan bahwa majunya Gibran merupakan hasil dari kecacatan produk Hukum oleh MK. Dari segi etika dalam politik dan demokrasi, terdapat berbagai pelanggaran. Hal ini dapat disebabkan oleh dukungan dari pihak yang berkuasa dalam menerapkan strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan. Maraknya mencuat isu politik dinasti di akhir masa kepemimpinan presiden Joko Widodo menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat tentang bagaimana nantinya politik dinasti ini dapat menciptakan peluang bagi keluarga petahana dalam menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan golongan. Namun, disatu sisi juga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama dalam partisipasi politik di Indonesia (termasuk putra presiden sekalipun).

Dampak dari Politik Dinasti terhadap Pemerintahan Suatu Negara

Pada umumnya politik dinasti memberikan dampak yang kompleks dalam sistem pemerintahan. Sebagaimana dampak positif dari politik dinasti yang terjadi saat ini di Indonesia yakni kontinuitas kepemimpinan bahwa adanya keluarga yang pernah berpolitik tentunya berpeluang meneruskan visi dan kebijakan yang dirancang sebelumnya ke dalam jangka panjang. Selain itu, memperoleh dukungan dengan basis elektoral karena pihak keluarga sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun, dan dukungan secara mendalam dapat membuat stabilitas politik. Hal ini juga berdasarkan pengalaman dan keterampilan anggota keluarga dinasti politik sehingga kondisi lingkungan tersebut mendorong anggota keluarga senantiasa mengakumulasi ilmu yang dimiliki untuk diimplementasikan ke dalam pelayanan publik. Kemudian memiliki akses ke sumber daya dikarenakan anggota keluarga yang berpolitik memiliki jaringan yang besar dan luas, tentunya hal ini akan membantu dalam mengimplementasikan proyek ataupun program kerja lainnya dalam mendukung konstituenya.

Adapun dampak negatif dari politik dinasti di Indonesia menurut Zulkieflimansyah yakni politik dinasti yang terjadi dapat dianggap sebagai mesin politik yang selalu berorientasi pada kekuasaan sehingga tidak optimal dalam menjalankan fungsi partai secara ideal. Selain itu, rekrutmen terhadap pemilihan yang didasarkan pada popularitas dalam meraih kemenangan sehingga tidak melalui proses kaderisasi. Kemudian, partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkualitas akan tertutup karena sirkulasi kekuasaan hanya berputar terus menerus di kalangan elit, dan tidak menutup kemungkinan terjadinya negosiasi dalam menjalankan tugas kenegaraan. Kesulitan dalam mewujudkan demokrasi dan memperkecil peluang terwujudnya sistem pemerintahan yang baik dan bersih dikarenakan semakin lemahnya kontrol terhadap kekuasaan. Sehingga menyebabkan pemerintahan tidak berjalan secara efektif dan menimbulkan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti kolusi, nepotisme dan korupsi. Politik dinasti yang terjadi tentunya akan memberikan keuntungan tertentu dan ketidakadilan dalam politik yang berpengaruh terhadap sistem pemerintahan Indonesia.

Sehingga penting untuk memperhatikan keseimbangan sistem politik di Indonesia yang melibatkan partisipasi publik dan diperlukannya memperkuat sistem politik di Indonesia secara demokratis.

Pencegahan dan Penanggulangan terhadap politik dinasti di Indonesia

Terdapat beberapa langkah untuk mencegah dan mengatasi Dinasti Politik. Salah satunya adalah dengan membuat regulasi yang ketat terhadap perekrutan dan promosi pegawai negeri dan pejabat publik berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Regulasi tersebut harus memastikan seleksi yang transparan, objektif, dan adil, serta tidak memperbolehkan kepentingan pribadi atau keluarga. Selain itu, aturan juga harus dibuat untuk melarang kerabat dekat atau keluarga pejabat publik untuk mengambil posisi atau jabatan yang sama di lembaga publik yang sama. Regulasi ini harus diatur dalam undang-undang dan ditegakkan dengan sanksi yang tegas. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik juga harus ditingkatkan. Ini termasuk mengungkapkan sumber dana kampanye, menjamin akses publik terhadap informasi publik, dan menghindari praktik penyelewengan kekuasaan. Pendidikan dan pelatihan juga harus diberikan pada masyarakat, terutama pada pemilih, untuk memahami betapa berbahayanya tindakan nepotisme dan dinasti politik terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan yang baik.

Meskipun seseorang yang terampil dalam politik dalam negeri dapat memimpin suatu negara atau wilayah, namun tindakan politik dapat memiliki dampak negatif terhadap stabilitas sosial dan pemerintahan yang demokratis. Hal ini terjadi ketika sekelompok orang atau sekelompok kecil orang memiliki ikatan yang kuat dengan institusi politik dan pemerintahan, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan kekuatan dan akses ke sumber daya negara demi kepentingan pribadi mereka. Pemerintahan atau lembaga politik yang dalam jangka waktu lama didominasi oleh satu keluarga atau kelompok juga dapat menghambat kemajuan dan perubahan sosial, merugikan legitimasi dan integritas pemerintah serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Penting untuk tidak hanya mempertimbangkan keterampilan kepemimpinan seseorang, tetapi juga prinsip-prinsip demokrasi, kohesi sosial, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, mempertahankan dan memajukan praktik politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut sangatlah penting agar dapat mempengaruhi suatu daerah atau bangsa dalam jangka panjang. Selain itu, pendidikan dan pengajaran publik juga dapat membantu warga negara dalam memilih pemimpin yang taat hukum dan dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan keadilan sosial dalam kepemimpinan mereka.

Penutup

Politik dinasti telah menjadi topik yang marak diperbincangkan di Indonesia. Politik dinasti sering menjadi perdebatan karena dapat mempengaruhi sistem pemerintahan suatu negara. Meskipun demokrasi memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan bersama, tetapi adanya politik dinasti dan kekuasaan tertinggi yang dipegang segelintir orang atau para elit dapat menimbulkan KKN di pemerintahan. Politik dinasti dapat menciptakan ketidaksetaraan status sosial pada kontestasi politik, sehingga memicu kecacatan beretika dan representasi demokratis dalam berpolitik. Salah satu isu yang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat yakni Gibran Rakabuming Raka selaku putra sulung Presiden Jokowi yang mencalonkan diri pada pemilu. Hal ini dikarenakan adanya ikatan keluarga yang dapat mencederai integritas dan keadilan dalam proses politik, sehingga menciptakan dilema etis di dalamnya. Kehadiran dinasti politik dalam suatu negara dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi dan merusak prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, dan keadilan dalam politik. reformasi dalam proses rekrutmen politik agar lebih transparan, berintegritas, dan berdasarkan

pada kualifikasi serta kapabilitas individu. Penguatan peran partai politik sebagai penjaga integritas dan kualitas calon pemimpin juga dianggap krusial untuk mencegah praktik politik dinasti. Selain itu, kontrol dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan demokratis perlu diperkuat melalui mekanisme *check and balances*. Pentingnya memperketat regulasi, penerapan prinsip-prinsip demokrasi internal, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan calon juga menjadi langkah-langkah yang dapat menghindari praktik dinasti yang dapat mencederai praktik demokrasi di Indonesia.

Daftar Referensi

- Adinata, A. C., Saputra, N. K., & Devisepte, O. S. (2023). Nepotisme dan Dinasti Politik yang Berada di Dalam Pemerintahan Indonesia. *Nomos: Law Review*, 1(01).
- Agus. (2022, Februari 28). Tampilan Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2596/1959>
- BBC. (n.d.). *Pilpres 2024: Jokowi Dulu Dan Sekarang, Antara "Harapan Dan Kenyataan."* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cprxqvw7lido>
- Biro Administrasi Kemahasiswaan Alumni dan Informasi Universitas Medan Area. (2023). Dampak Politik Dinasti : Keuntungan dan Tantangan bagi Sistem Politik
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan kritis politik dinasti di Indonesia. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177-191.
- Hidayati, N. (2014). Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 10(1).
- Humas, T. (2022, November 4). *Pengertian Etika Menurut Ahli*. Universitas Islam An Nur Lampung. <https://an-nur.ac.id/pengertian-etika-menurut-ahli/>
- Indonesia, C. (2020, Desember 15). *Rekapitulasi KPU Medan: Bobby 393.327 Suara, Akhyar 342.580*. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201215193905-32-582582/rekapitulasi-kpu-medan-bobby-393327-suara-akhyar-342580>
- Indonesia, C. (2020, Desember 16). *Hasil Rekapitulasi KPU, Gibran Jadi Wali kota solo berikutnya*. Nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201216185450-32-583103/hasil-rekapitulasi-kpu-gibran-jadi-wali-kota-solo-berikutnya>. *Lex Renaissance*. 3(6), 1-4
- Nika, Imroatun. (2021). Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah di Solo 2020).
- Indonesia, M. K. R. (2015, July 10). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pengertian Politik Dinasti | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>
- Intan, G. (2019, December 23). *Adakah Yang Salah Dengan Dinasti Politik?*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/adakah-yang-salah-dengan-dinasti-politik-/5216466.html>
- Ismail, A. S. (2023). the Proses Terbentuknya Asas Praduga Terhadap Politik Dinasti Suatu Negara. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 37-44.
- Kemendagri. (2023, June 9). Pengertian Demokrasi, Model, dan Prinsipnya. <https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya>
- Liputan6.com. (2019, December 12). *Perjalanan Gibran Rakabuming Raka maju Jadi Calon Wali kota solo*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/4132805/perjalanan-gibran-rakabuming-raka-maju-jadi-calon-wali-kota-solo?page=5>
- Rahadatul' Aisy, S. *Dinasti Politik di Indonesia: Studi Kasus Kekuasaan Keluarga di Berbagai Periode Sejarah*.

Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111-119.